



20

26

RENCANA KERJA

RENJA – 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

Penyusunan Rencana kerja Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup. Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Rencana kerja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu Semoga dokumen Rencana kerja ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola lingkungan hidup yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Pemalang, Agustus 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

WIJI MULYATI, S.K.M
. 19700131 199303 2 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang1

1.2 Landasan Hukum.....2

1.3 Maksud dan Tujuan4

1.4 Sistematika Penulisan5

**BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU 6**

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan
 Capaian Renstra Perangkat Daerah6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD21

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat33

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah36

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan38

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42

4.1 Rencana Pendanaan42

BAB 5 PENUTUP 51

5.1 Kaidah Pelaksanaan51

5.2 Rencana Tindak lanjut52

Q. RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2026 ini merupakan penjabaran rencana strategis (renstra) tahun 2025-2029. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan Renja ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Pada rancangan akhir rencana kerja ini telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2024 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2025. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis Lingkungan Hidup, baik di Kabupaten Pemalang, tingkat provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Serta memperhatikan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan tahun 2026 untuk pengalokasian pagu indikatif dan penentuan target lokasi.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang juga memuat usulan dari Pokok Pikiran, Hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program dan kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Kerja (Renja Kerja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dan akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

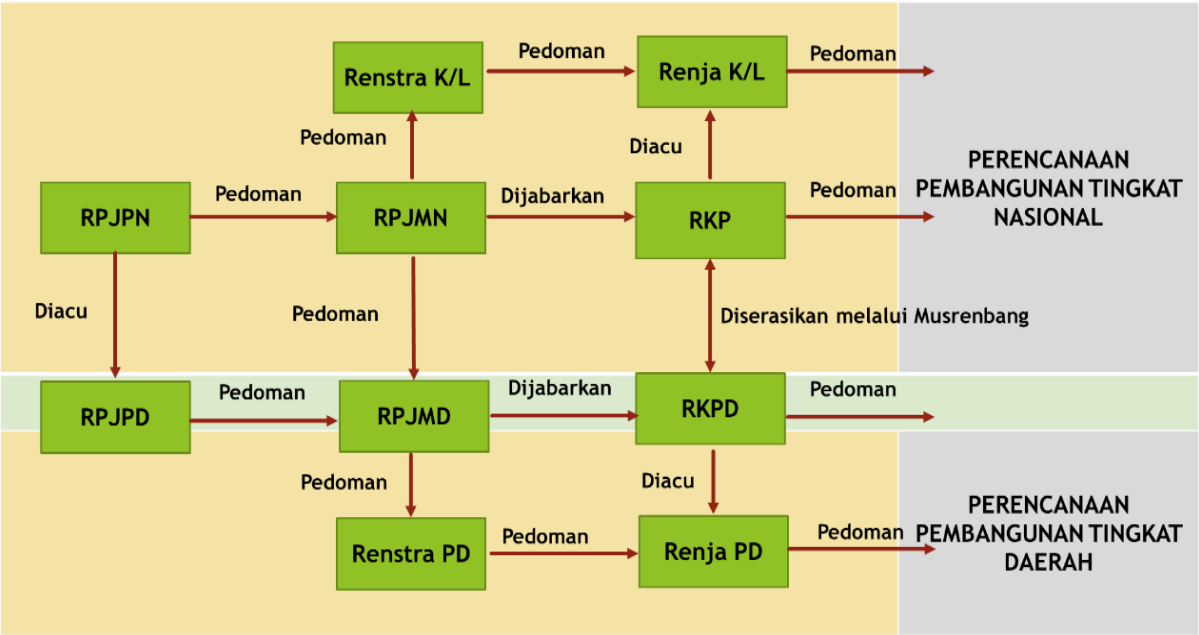
Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dalam hal pencantuman nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka nomenklatur, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta kodefikasi perangkat daerah telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan dimungkinkan dilakukan

pemutakhiran setiap tahunnya. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Proses penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja (PD) dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja dan Dokumen Perencanaan lainnya



5/23/2017

Rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing OPD.

1.2. Landasan Hukum

Seiring pelaksanaan otonomi daerah, daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola pembangunan daerahnya, termasuk pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib Kabupaten berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jadi Undang-undang;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jadi Undang-undang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jadi Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

- a) Maksud dari penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :
 1. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah.
 2. Menjamin keterpaduan arah kebijakan dan strategi RPJMD serta keselarasan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang mengalami perubahan sesuai sasaran dalam rencana strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana kerja PD setiap tahunnya
 3. Sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi
- b) Tujuan
 Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana kerja Perangkat Daerah ini adalah :
 1. Mengevaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun yang akan datang;
 2. Mengumpulkan rancangan atau usulan program serta kegiatan dari bidang dalam lingkungan kerja DLH Kabupaten Pemalang;
 3. Memilih, memilah dan menelaah rancangan atau usulan program serta kegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas;

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

**BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DLH TAHUN LALU**

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai dengan target kinerja dalam Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, untuk mengetahui :

- 1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan
- 3. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berikut ini adalah Evaluasi hasil pelaksanaan Renca kerja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sampai dengan Tahun 2024. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang melaksanakan urusan lingkungan hidup sebanyak 10 Program dengan 17 Kegiatan dan 42 Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 29.028.583.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program DLH Kab. Pemalang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Target Renstra 2024	Realisasi 2024	
					Kinerja	Keuangan (%)
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
1	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	100	100	51,65
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
2	Persentase Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan	%	100	100,00	100,00	96,31
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai	69,67	69,52	66,81	98,72
4	Indeks Kualltas Air	Nilai	47,83	47,59	48,33	
5	Indeks Kualitas Udara	Nilai	89,58	89,53	92,83	
6	Indeks Tutupan Lahan	Nilai	70,02	70,16	50,39	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
7	Persentase Pengelolaan Kehati	%	100	100	75	89,66
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN					

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Target Renstra 2024	Realisasi 2024	
					Kinerja	Keuangan (%)
	BERACUN (B3) DAN LIMBAHBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
8	Persentase Pengendalian B3 & LB3	%	100	100	100	95.96
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
9	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	%	100	100,00	75	91.15
10	Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30	29,00	90	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
11	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	100	100	100	92.65
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
12	Persentase Penghargaan yang diberikan	%	100	100	100	79.12
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
13	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	40
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
14	Persentase sampah yang terangkut	%	85	83,00	98.80	94.39
15	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	77	76,00	98.68	87.11

Adapun capaian kinerja urusan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2024	Realisasi Capaian RKPD	Realisasi Capaian RPJMD	Tingkat Capaian RPJMD
							2024	s/d 2024	s/d 2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)			Indeks	69,82	69,07	66,29	66,29	94,95
		1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	81	79	79	100	100
		2	Skor indeks pencemaran udara	Indeks	89,58	89,43	84,16	84,16	94,11

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2024	Realisasi Capaian RKPD	Realisasi Capaian RPJMD	Tingkat Capaian RPJMD
							2024	s/d 2024	s/d 2024
		3	Skor indeks pencemaran air	Indeks	47,83	46,56	48,33	48,33	103,80
		4	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	%	100	100	100	100	100
		5	Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100	100	100	100	100
		6	Penyelesaian kasus lingkungan	%	100	100	100	100	100
		7	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	100	20	20	20	100
		8	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	%	43,096	43,78	43,78	43,78	100
		9	Persentase penanganan lahan kritis	%	0.0863	0.0463	0.0463	0.0463	100
		10	Kualitas pengelolaan sampah di wilayah Kab. Pematang	%	100	98,8	85.38	85.38	85.38
		11	Persentase Penanganan sampah	%	70,00	72,92	59.50	59.50	59.50
		12	Persentase pengurangan sampah	%	30,00	25,88	25.88	25.88	25.88

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DLH dan Pencapaian Renstra DLH Kabupaten Pemalang s/d Triwulan II Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (Tahun 2025)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Tahun 2025)	
			Penetapan		I		II		TOTAL		%	
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	SAKIP	nilai	64,01	19.259.400	64,44	3.787.568	0,00	3.502.545	64,44	7.290.113	101	37,85
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja PD	%	100	14.386	33	1.273	33	1.273	67	2.546	67	18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	10.775	2	1.273	2	1.273	4	2.546	50	24
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	3.611	1	-	1	-	2	-	200	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan kelancaran administrasi keuangan	%	100	14.378.823	27	3.786.296	20	3.501.272	25,00	8.360.240	25,00	57,18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	12	14.368.834	3	3.786.296	3	3.501.272	6	7.287.567	50	51

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (Tahun 2025)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Tahun 2025)	
					I		II		TOTAL		%	
			Penetapan									
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	3.390	1	-	0	-	1	-	100	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	1	4.928	0	-	0	-	0	-	0	0
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	1	1.671	0	-	0	-	0	-	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	%	1000	243.907	60	-	0	-	60	-	6	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1000	243.907	60	-	0	-	60	-	6	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum perangkat daerah	%	100	266.123	15	59.733	15	49.819	30	109.552	30	41
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	5.000	0	95	1	307	1	402	50	8

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (Tahun 2025)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Tahun 2025)	
					I		II		TOTAL		%	
					Penetapan							
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	3.437	0	-	0	-	0	-	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket/bulan	3	112.243	0	23.033	3	14.514	3	37.547	100	33
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	17.052	0	3.554	4	6.025	4	9.579	67	56
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	12.000	0	3.809	1	2.063	1	5.872	100	49
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	200	116.391	32	29.242	22	26.910	54	56.152	27	48
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	23.017	25,00	-	0,00	22.635	25,00	22.635	25,00	98,34
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	15	15.493	0	-	1	3.881	1	3.881	7	25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4	67.970	0	-	1	1.800	1	1.800	25	3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (Tahun 2025)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Tahun 2025)	
					Penetapan		I	II	TOTAL		%	
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.910.511	23	884.144	45	890.402	68	1.774.546	68	45
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	20	4.620	5	1.500	10	750	15	2.250	75	49
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	251.609	0	38.948	0	43.951	0	82.899	0	33
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	3.654.282	0	843.696	0	845.700	0	1.689.396	0	46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	362.187	3	24.744	49	35.170	51	59.914	51	17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	28	78.498	1	23.214	13	16.638	14	39.852	50	51
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	1.500	0	-	4	-	4	-	80	0
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	265.659	0	-	1	11.590	1	11.590	33	4

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (Tahun 2025)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Tahun 2025)	
					I		II		TOTAL		%	
			Penetapan									
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	3	16.530	0	1.531	1	6.941	1	8.472	33	51
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100,00	270.682	0,00	2.000	0,00	1.684	0,00	3.684	0	1,36
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase tersedianya Dokumen RPPLH	%	100	180.597	0	1.200	0	1.024	0	2.224	0	1
Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	3	180.597	0	1.200	0	1.024	0	2.224	0	1
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Dokumen KLHS	%	100	90.085	0	800	0	660	0	1.460	0	2
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	dokumen	1	90.085	0	800	0	660	0	1.460	0	2
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan	%	100,00	405.724	25,00	-	25,00	9.622	50,00	9.622	50,00	2,26
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	nilai	76,78	65.000	66,81	14.276	66,81	6.312		20.587		31,67
	Indeks Kualitas Air	nilai	47,59									
	Indeks Kualitas Udara	nilai	89,53									
	Indeks Kualitas Lahan	nilai	70,16									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (Tahun 2025)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Tahun 2025)	
					Penetapan		I		II		TOTAL	
			6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
3	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan LH	%	100	405.724	0	-	0	9.622	0	9.622	0	2
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	2	248.381	0	-	0	9.622	0	9.622	0	4
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	16.047	0	-	0	-	0	-	0	0
Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim	laporan	1	141.296	0	-	1	200	1	200	100	0
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	2	379.060	0	-	0	20.369	0	20.369	0	5
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Kehati	%	100,00	84.455	25,00	-	25,00	870	50,00	870	50	1,03
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Kehati	%	100	84.455	0	-	0	870	0	870	0	1
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	84.455	0	-	0	870	0	870	0	1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (Tahun 2025)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Tahun 2025)	
			Penetapan		I		II		TOTAL		%	
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)	Persentase Pengendalian B3 & LB3	%	100,00	21.023	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0	0,00
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan sementara LB3	%	100	21.023	0	-	0	-	0	-	0	0
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	laporan	1	21.023	0	-	0	-	0	-	0	0
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	%	100,00	14.168	8,00	1.000	8,00	6.418	25,00	10.512	25,00	21,02
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	29,00		0,00		0,00		30		103,45	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Perlindungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	%	100	14.168	8	1.000	32	6.418	40	7.418	40	52

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (Tahun 2025)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Tahun 2025)	
					I		II		TOTAL		%	
					Penetapan							
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	25	14.168	2	1.000	8	6.418	10	7.418	40	52
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	100,00	137.021	25,00	4.490	25,00	5.593	50,00	10.083	50	7,36
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	100	137.021	0	4.490	0	5.593	0	10.083	0	7
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	6	93.780	0	3.390	2	3.039	2	6.429	33	7
Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	500	43.242	0	-	250	210	250	210	50	0
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga	4	160.352	0	1.100	0	2.345	0		0	0

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (Tahun 2025)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Tahun 2025)	
					Penetapan		I	II	TOTAL		%	
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100,00	3.025	0,00	-	0,00	1.200	0,00	1.200	0	39,67
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	%	100	3.025	0	-	0	1.200	0	1.200	0	40
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	pengaduan	10	3.025	0	-	6	1.200	6	1.200	60	40
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut	%	82,00	6.027.932	65,00	1.188.060	65,00	1.517.622	0,00	2.705.683	0	44,89
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	75,00	9.327.422	75,46	1.188.060	75,46	3.193.829	0,00	4.381.889	0	46,98
Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	%	24	9.327.422	6	1.188.060	6	3.218.638	12	4.406.699	50	47
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	4	409.299	0	-	2	11.139	2	11.139	50	3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (Tahun 2025)						Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Tahun 2025)	
			Penetapan		I		II		TOTAL		%	
3	4		6		7		8		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	5	2.510.000	0	-	2	1.665.068	2	1.665.068	40	66
Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	dokumen	2	380.191	0	-	0	24.810	0	24.810	0	7
Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	ton	85000	6.027.932	9232	1.188.060	16241	1.517.622	25473	2.705.683	30	45

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLH

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026, indikator kinerja urusan lingkungan hidup adalah Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan. Indikator kinerja beserta target dan capaian realisasinya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	11	12	13	13	14	15
1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan	%				78,92	79,92	80,92	81,92	80,84	79,92	80,92	81,92	80,84	80,84	Proyeksi disamakan dengan target
2	Skor indeks pencemaran udara	Indeks				85,62	89,37	89,43	89,48	89,58	84,16	89,43	89,48	89,58	89,58	
3	Skor indeks pencemaran air	Indeks				47,33	46,24	46,56	47,28	47,83	48,33	46,56	47,28	47,83	47,83	
4	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Penyelesaian kasus lingkungan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%				50	60	70	80	100	40	40	40	100	100	
8	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	%				43,070	43,074	43,078	43,083	43,092	43,074	43,078	43,083	43,092	43,092	
9	Persentase penanganan lahan kritis	%				0,0263	0,0363	0,0463	0,0563	0,0763	0,0363	0,0463	0,0563	0,0763	0,0763	
10	Kualitas pengelolaan sampah di wilayah Kab.	%				71,43	78,57	78,57	85,71	92,86	78,57	78,57	85,71	92,86	92,86	

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	11	12	13	13	14	15
11	Persentase Penanganan sampah	%				74.97	73,99	72,92	71,83	70,00	73,99	73,99	72,92	70,00	70,00	
12	Persentase pengurangan sampah	%				22.88	23,94	25,88	26,94	30,00	23,94	23,94	25,88	30,00	30,00	

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024. Terdapat beberapa rekomendasi langkah langkah perbaikan yang harus dilaksanakan oleh DLH, antara lain :

1. Mengoptimalkan pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021.
2. Menyusun crosscutting secara baik sampai pada program dan kegiatan.
3. Menyusun lebih optimal dalam penyusunan manajemen risiko sampai dengan sub kegiatan

Tabel 2.7
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	23,09
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	20,80
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	10,13
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	15,17
	Jumlah	100 %	69,19

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup” dan ” Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup,” antara lain sebagai berikut:

1. Pelanggaran tata ruang
Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumuk pasir.
2. Menurunnya fungsi ekologi
Penurunan daya dukung lingkungan akibat rusaknya ekosistem menimbulkan beragam dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung tersebut antara lain, erosi tanah, longsor, debit air sungai yang tidak mantap, dan ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai. Sedangkan dampak tidak langsung

- antara lain penurunan resapan air dan erosi tanah berakibat pada penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Selain itu juga terjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, baik yang ada di daratan seperti keragaman tanaman endemik, satwa mamalia, burung, dan serangga maupun kelangsungan hidup terumbu karang, mangrove, dan vegetasi pantai.
3. Meningkatnya pencemaran lingkungan
Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek – aspek lingkungan. Dampaknya antara lain terjadinya pencemaran air dan air tanah yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia dari aktivitas pertanian; pencemaran bakteri coli dari aktivitas peternakan, serta pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Hal – hal tersebut di atas tentunya dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan dapat merugikan kesehatan.
 4. Peningkatan volume sampah
Meningkatnya volume sampah padat baik organik, anorganik maupun limbah B3 Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik mengakibatkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan cara *open dumping*. Hal ini juga diperparah dengan minimnya lokasi tempat pengumpulan sampah (TPS) sementara dan lemahnya manajemen pengelolaan sampah di lingkungan masing - masing. Pada akhirnya, penanganan sampah dibebankan pada TPA Pegongsoran yang daya tampungnya semakin menurun karena adanya keterbatasan lahan.
 5. Fenomena pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*)
Akibat dari adanya pemanasan global antara lain adalah perubahan musim yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan, pola pemanfaatan sumber daya hutan, dan meningkatnya resiko kegagalan program rehabilitasi.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Pemalang tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, berikut hambatan dan permasalahan yang ada di kabupaten Pemalang :

Tabel 2.8 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Pemalang

Tusi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Tugas:	Permasalahan:	Faktor Penghambat:

Tusi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1. Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); 2. Urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Kabupaten. 3. Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Daerah Kabupaten. 4. Urusan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten. 5. Urusan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 6. Urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 7. Urusan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah. 8. Urusan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat tingkat Daerah. 9. Urusan Pengaduan Lingkungan Hidup. 10. Urusan Persampahan Fungsi: a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;	1. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 2. Kurangnya upaya pemulihan lingkungan hidup. 3. Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan	1. Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan bidang lingkungan hidup 2. Meningkatnya laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk 3. Meningkatnya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan industri. 4. Laju pencemaran dan perusakan lingkungan yang tidak sebanding dengan upaya pengendalian dan pemulihan. 5. Pengendalian lingkungan ditengah Pandemi Covid-19. 6. Jumlah personil / Sumber Daya Manusia khususnya SDM Teknis seperti tenaga pengawas lapangan yang masih kurang. 7. Kurangnya sarana prasarana labolatorium lingkungan dan SDM yang menguasai bidang labolatorium lingkungan. 8. Pengaduan masyarakat bersifat pasif atau menunggu laporan dari masyarakat. 9. Kurangnya armada/ dumptruk, kurangnya sarana prasarana perlengkapan pengangkutan persampahan yang dilengkapi dengan kecanggihan teknologi, serta kurangnya alat berat buldozer maupun eksavator Faktor Pendorong: 1. Tersedianya dana APBD dan APBN dibidang lingkungan hidup. 2. Lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 3. Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang lingkungan hidup

Tusi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. 4. Tersedianya PPLHD sebagai instrument pengawasan. 5. Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan industri dan masyarakat seperti program PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, dll 6. Adanya sektor Dukungan penyelenggaraan pelatihan dibidang lingkungan hidup 7. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung 8. Adanya program CSR perusahaan yang mendukung pengelolaan lingkungan

Dengan memperhatikan hal – hal tersebut di atas maka isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas DLH Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industri, rumah sakit, perhotelan, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara.
2. Belum adanya pejabat fungsional PPNS dan terbatasnya pejabat PPLHD mengakibatkan lemahnya penataan peraturan dan belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
3. Penguatan kapasitas operasional laboratorium lingkungan;
4. Kurangnya kesadaran & partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Kurangnya upaya konservasi dan restorasi lingkungan hidup;
6. Masalah Persampahan yang semakin kompleks perlu adanya Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan;
7. Pemanasan global.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.053.511.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19,437,640,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 laporan	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 laporan	4.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.500.000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.500.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.763.355.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14,397,272,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/bulan	14.755.745.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 orang / bulan	14,367,272,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem SKPD	3 Laporan	4.110.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	1 dokumen	10,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				218,500,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	200,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	9.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	18,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				275.172.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				462,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.622.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,000,000	Antisipasi naiknya SSH penyediaan komponen listrik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.550.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	12,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	10,000,000	Jumlah paket meningkat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	180,000,000	Antisipasi kenaikan SSH penyediaan logistik kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	40,000,000	Kualitas cetak dan penggandaan meningkat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10,000,000	Jumlah bacaan bertambah
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	131.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 lapora	200,000,000	Antisipasi naiknya SSH komponen rakor
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				67.718.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200,000,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	29.500.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	60,000,000	Jumlah unit bertambah
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	38.218.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	40,000,000	Jumlah unit bertambah
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	6 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	6 Unit	40,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Disediakan			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.727.301.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,960,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		JUmlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100 Laporan	4.986.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		JUmlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100 Laporan	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	251.519.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	150,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.470.796.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,800,000,000	Peningkatan jumlah penyediaan jasa pelayanan umum
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.465.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				275,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	90.965.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	150,000,000	Kulitas pemeliharaan meningkat
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	1.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	5,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	16.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	10,000,000	Kulitas pemeliharaan meningkat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	100,000,000	Kulitas pemeliharaan meningkat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	10,000,000	Kulitas pemeliharaan meningkat
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				150.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				315,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				130.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				265,000,000	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	130.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	265,000,000	Peningkatan kualitas dokumen pelaporan
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				20.000.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				50,000,000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	20.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	50,000,000	Peningkatan kualitas dokumen pelaporan
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				746.387.200	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.220,000,000	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				746.387.200	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.220,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	240,000,000	Meningkatnya jumlah uji air tanah dan udara
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	73.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	250,000,000	Fasilitasi perubahan CA menjadi TWA
	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan		Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	90.000.000	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan		Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	90.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	iklim tingkat kabupaten/kota					iklim tingkat kabupaten/kota					
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	333.387.200	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	730,000,000	Peningkatan kapasitas operasional laboratorium
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				50.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				200,000,000	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				50.000.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				200,000,000	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	200,000,000	Peningkatan kualitas data dan informasi terkait kehati
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				15.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				50,000,000	
	Penyimpanan sementara Limbah B3				15.000.000	Penyimpanan sementara Limbah B3				50,000,000	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	30 laporan	15.000.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	30 laporan	25,000,000	Peningkatan kualitas data dan pelaporan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				25.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				30,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				30,000,000	
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	25 laporan	25.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/Kota		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 laporan	30,000,000	Optimalnya pengawasan kepada pelaku usaha
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				212.188.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				400,000,000	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				212.188.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				400,000,000	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	103.188.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	250,000,000	Meningkatnya kualitas kompetensi SDM
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan		Jumlah Masyarakat/Kelompok	500 Orang	45.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan		Jumlah Masyarakat/Kelompok	500 Orang	45.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kampanye Lingkungan Hidup		Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat			Kampanye Lingkungan Hidup		Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat			
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6 dokumen	64.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	11 dokume	150,000,000	Bertambahnya jumlah pendampingan dan pembinaan
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				0	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				0	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		0	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		0	Peningkatan Jumlah lomba lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				5.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				50,000,000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				5.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				50,000,000	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	10 dokume	5.000.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	15 dokume	50,000,000	Pembuatan laporan akhir terkait pengaduan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				5.582.380.200	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				8,400,000,000	
	Pengelolaan Sampah				5.582.380.200	Pengelolaan Sampah				8,400,000,000	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Masyarakat,	15 Kelompok	468.354.200	Peningkatan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Masyarakat,	15 Kelompok	468.354.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	dalam Pengelolaan Persampahan		Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			dalam Pengelolaan Persampahan		Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 dokumen	100,000,000	Review Jakstrada Pemalang
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 laporan	125.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 laporan	100,000,000	Menambah jumlah sosialisai 3R ke masyarakat
	Penanganan sampah melalui pengangkutan		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	85000 ton	3.967.866.000	Penanganan sampah melalui pengangkutan		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	85000 ton	8,000,000,000	Untuk menambah jumlah ritasi armada pengangkut sampah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	5 unit	1.021.160.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	110 unit	200,000,000	Mengejar pemenuhan Sarpras yang belum ideal jumlahnya
					25.839.466.400					80.924.000.000	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui perencanaan pembangunan daerah yaitu Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota , provinsi dan Nasional. Melalui Musrenbang diharapkan dapat mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan top down dan bottom up.

Tabel. 2.10 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Pamutih Kec. Ulujami	Pelatihan Pengelolaan Sampah	30 Orang	Musrenbang Kecamatan
2	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Banjarsari Kec. Bantarbolang	Pelatihan pengolahan sampah menjadi kompos	50 Orang	Musrenbang Kecamatan
3	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Belik Kec. Belik	Pelatihan pengolahan sampah menjadi kompos	50 Orang	Musrenbang Kecamatan
4	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Clekatakan Kec. Pulosari	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	30 Orang	Musrenbang Kecamatan
5	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Kalisaleh Kec. Belik	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	30 Orang	Musrenbang Kecamatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Kandang Kec. Comal	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	30 Orang	Musrenbang Kecamatan
7	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Kebon Gede Kec. Bantarbolang	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	25 Orang	Musrenbang Kecamatan
8	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal	Pelatihan Budidaya Magot	30 Orang	Musrenbang Kecamatan
9	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Warungpring Kec. Warungpring	Pelatihan Pengelolaan Sampah	30 Orang	Musrenbang Kecamatan
10	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Bulakan Kec. Belik	Pelatihan Pengelolaan Sampah	30 Orang	Musrenbang Kecamatan
11	(2.11.11) Program Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01) Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01.001) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Beluk Kec. Belik	Pelatihan Pengelolaan Sampah	30 Orang	Musrenbang Kecamatan

**BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan urusan Lingkungan Hidup melihat dari perkembangan pembangunan nasional dibidang Lingkungan Hidup, berdasarkan arah kebijakan dan program strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan arah kebijakan nasional.

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Menuju Indonesia Emas dengan Visi yaitu “Lestari dan Seimbang Antara Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan” dengan misi (agenda) 8 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan”.

Arah kebijakan lingkungan hidup dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 berfokus pada penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular untuk mendukung ekonomi hijau. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, urusan lingkungan hidup diintegrasikan melalui pengurangan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 37,14% dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 76,67%. dengan prioritas pengelolaan sampah dan air, RKP 2026 juga akan mendorong pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan rendah karbon di tingkat daerah dan memperkuat sistem pemantauan melalui pengumpulan data yang terintegrasi. Fokus Utama Kebijakan Lingkungan Hidup pada RKP 2026 adalah Penguatan Ketahanan Lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada upaya penanganan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim akan didorong melalui penguatan sistem ketahanan bencana dan sistem peringatan dini bencana. Sedangkan pembangunan rendah karbon diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 3.1.
Sasaran, Indikator dan Target PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No	Sasaran	Target Tahun 2026
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	76,67
2.	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	37,14

Mengacu pada prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2026 ditetapkan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Tema Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah Penguatan kebijakan Fasilitas dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah Penguatan kebijakan Fasilitas dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif .

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang untuk sektor lingkungan hidup adalah meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan.

III.2. Tujuan dan sasaran Renja DLH Kabupaten Pemalang.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan dan mengemban tugas pokok dan fungsinya harus mampu menerjemahkan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yakni:

“Pemalang Bercahaya : Bersih, Cakap, Handal dan Mulya“

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berkontribusi pada **Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.** Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029).

Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah “Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah”. Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya hasil pengujian air, udara dan tanah;
- 2. Meningkatnya pengelolaan sampah.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2026
1	2	3	4	5
		Indeks Kualitas Air	Indeks	84,93

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2026
Meningkatnya kualitas udara, air dan tanah		Indeks Kualitas Udara	Indeks	75,95
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	63,33
	Meningkatnya pengujian air, udara dan tanah	Kualitas air permukaan pada parameter BOD	mg/l	2
		Kualitas udara pada konsentrasi SO2 dan NO2	µg/m3	75
		Luas Tutupan Lahan	Ha	43,105
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	86,47
Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	%	80,84
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup yang efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	nilai	64,01

III.3. Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Program dan Kegiatan 2026, DLH Kabupaten Pemalang direncanakan berjumlah 10 Program, 17 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 25.839.466.400,- Rencana Kerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2026, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				330.000.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				200.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten /Kota	1 dokumen	200.000.000
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				130.000.000
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	130.000.000
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				405.000.000

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				405.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	70.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	35.000.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	300.000.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				100.000.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				100.000.000
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	100.000.000
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				30.000.000
	Penyimpanan sementara Limbah B3				30.000.000
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	25 laporan	30.000.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				75.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang - undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/ atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	30 laporan	75.000.000
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				230.000.000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				230.000.000
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	11 dokumen	60.000.000

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 orang	20.000.000
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	150.000.000
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				40.000.000
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	11 entitas	40.000.000
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				20.000.000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				20.000.000
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15 dokumen	20.000.000
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				5.545.000.000
	Pengelolaan Sampah				5.545.000.000
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100 orang	125.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	110 unit	120.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen	200.000.000
	Penanganan sampah melalui pengangkutan		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	80000 ton	5.000.000.000
	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	100.000.000
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.759.000.000

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	15.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.930.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 orang	13.900.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 dokumen	10.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	10.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				140.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60.000.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	80.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				400.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	160.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	25.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	180.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30.000.000

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	30.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.018.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2500 laporan	8.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	180.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.830.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				216.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	100.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	8.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	8.000.000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH KABUPATEN PEMALANG

IV.1 Rencana Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029 dan untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pemalang 2025-2029, yaitu **“Pemalang Bercahaya : Bersih, Cakap, Handal dan Mulya”** yang ditempuh melalui enam misi.

Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Pemalang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, maka dapat ditelaah dari Misi pada Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029).

Selaku Perangkat Daerah yang menunjang urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Pemalang melaksanakan Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistic, integrative, dan spasial.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana Tabel 4.1

Tabel 4.1 Usulan Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25.839.466.400,00						26.160.000.000
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			25.839.466.400,00						26.160.000.000
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			150.000.000,00						350.000.000
2	11	02	201		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			130.000.000,00						220.000.000
2	11	02	201	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten /Kota	1 dokumen	130.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	1 dokumen	220.000.000	
2	11	02	202		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			20.000.000,00						100.000.000
2	11	02	202	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	20.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	1 dokumen	100.000.000	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			746.387.200,00						1.110.000.000
2	11	03	201		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			746.387.200,00						1.110.000.000
2	11	03	201	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	250.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	2 dokumen	260.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	03	201	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	73.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	1 dokumen	75.000.000	
2	11	03	201	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	90.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	1 Laporan	170.000.000	
2	11	03	201	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 dokumen	333.387.200,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	2 dokumen	400.000.000	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			50.000.000,00					100.000.000	
2	11	04	201		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota			50.000.000,00					100.000.000	
2	11	04	201	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	50.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	1 dokumen	100.000.000	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			15.000.000,00					50.000.000	
2	11	05	201		Penyimpanan sementara Limbah B3			15.000.000,00					50.000.000	
2	11	05	201	0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	30 Usaha	15.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	25 laporan	50.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			25.000.000,00						30.000.000
2	11	06	201		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000,00						30.000.000
2	11	06	201	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	25 Badan Usaha	25.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	30 laporan	30.000.000	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			212.188.000,00						390.000.000
2	11	08	201		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			212.188.000,00						390.000.000
2	11	08	201	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6 dokumen	64.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	11 dokumen	130.000.000	
2	11	08	201	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	500 Orang	45.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	500 orang	60.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
Dinas Lingkungan Hidup															
2	11	08	201	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	103.188.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		4 lembaga	200.000.000	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			5.000.000,00						10.000.000	
2	11	10	201		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			5.000.000,00						10.000.000	
2	11	10	201	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	10 aduan	5.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		10 aduan	10.000.000	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			5.582.380.200,00						47.530.000.000	
2	11	11	201		Pengelolaan Sampah			5.582.380.200,00						47.530.000.000	
2	11	11	201	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	15 Kelompok	468.354.200,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		15 Kelompok	480.000.000	
2	11	11	201	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 dokumen	125.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 dokumen	500.000.000	
2	11	11	201	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	85000 ton	3.967.866.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		85000 ton	6.500.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	11	201	0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	5 Unit	1.021.160.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		5 Unit	5.000.000.000
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.053.511.000,00						30.629.000.000
2	11	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.000.000,00						46.500.000
2	11	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		2 Dokumen	15.000.000
2	11	01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 dokumen	4.000.000
2	11	01	201	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	3.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		3 dokumen	3.000.000
2	11	01	201	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		2 dokumen	3.000.000
2	11	01	201	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		2 dokumen	3.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	4 laporan	5.000.000	
2	11	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	3 Laporan	3.500.000	
2	11	01	201	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	1 Berita Acara	10.000.000	
2	11	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.763.355.000,00					15.010.000.000	
2	11	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 orang	14.755.745.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	172 orang	15.000.000.000	
2	11	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	1 Dokumen	1.500.000	
2	11	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	1 Laporan	4.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	4.110.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	3 Laporan	6.000.000	
2	11	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.500.000,00					300.000.000	
2	11	01	205	0005	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	9.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	100 Orang	300.000.000	
2	11	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah			275.172.000,00					445.000.000	
2	11	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.622.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	1 paket	10.000.000	
2	11	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.550.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	1 paket	15.000.000	
2	11	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	1 paket	15.000.000	
2	11	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia	1 paket	145.000.000	
2	11	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang	1 paket	30.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
											kuat serta daya saing sumberdaya manusia			
2	11	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	12.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 dokumen	15.000.000
2	11	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	131.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		200 laporan	230.000.000
2	11	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			67.718.000,00						100.000.000
2	11	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	29.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		10 Unit	50.000.000
2	11	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	38.218.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		5 unit	50.000.000
2	11	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.727.301.000,00						3.960.000.000
2	11	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2500 laporan	4.986.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		2500 laporan	5.000.000
2	11	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	251.519.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		12 laporan	255.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
Dinas Lingkungan Hidup															
2	11	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.470.796.000,00				Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		12 laporan	3.700.000.000
2	11	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			178.465.000,00							417.500.000
2	11	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	90.965.000,00				Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		28 unit	90.000.000
2	11	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	1.000.000,00				Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		4 Unit	2.500.000
2	11	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	16.500.000,00				Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		9 unit	10.000.000
2	11	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	70.000.000,00				Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		3 unit	300.000.000
Jumlah								24.876.273.000,00							26.160.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025-2029. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2026. Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada DLH dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra DLH yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang nantinya akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang akan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

V.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut :

- a. DLH Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan yang akan dirumuskan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 setelah diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026;
- b. DLH Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dengan berpedoman kepada Renja DLH Tahun 2026 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2026, Kepala DLH Kabupaten Pemalang wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2026.
- d. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam kaidah pelaksanaan ini, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini, maka:

- a. Koordinasi yang intensif antara unsur eksekutif dan legislatif perlu ditingkatkan agar perencanaan program dan kegiatan Tahun 2026 dapat berjalan lancar.
- b. Demi kesempurnaan dokumen ini, maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan urusan lingkungan hidup tahun 2026.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pemalang, Agusutus 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

WIJI MULYATI, S.K.M
19700131 199303 2 003

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang
Tahun 2026**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten /kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan - Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	✓			

Pemalang, Juli 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

WIJI MULYATI, S.K.M
Pembina
NIP. 19700131 199303 2 003